



Akuntabilitas Komitmen Indonesia Pada G20



Penyunting :
Irfa Ampri, Syurkani Ishak Kasim, Yulius Purwadi Hermawan

20 Desember 2013

- Elin A -

Akuntabilitas Komitmen Indonesia Pada G20

Penyunting

Irfa Ampri, Syukani Ishak Kasim, Yulius Purwadi Hermawan

Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20

Penyunting

Irfa Ampri
Syurkani Ishak Kasim
Yulius Purwadi Hermawan

Tim Penyusun

Yulius Purwadi Hermawan
Syurkani Ishak Kasim
Irfa Ampri
Elizabeth Tiur Manurung
Ivantia Mokoginta
Nanang Zaenal Arifin
PC Suroso
Rakhmindyarto
Ratih Indraswari
Regina P. Mboeik
Rulyusa Pratikto
Siwi Nugraheni
Yanuarita Hendrani

Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20

Diterbitkan oleh : Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan RI

Layout & Design Cover : Oktariany dan Denny

Cetakan Kesatu : Oktober, 2013

ISBN : 978-602-18738-1-6

Alamat : Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral, Gedung Radius
Prawiro, Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Tel. : 021-34831678
Fax. : 021-34831677
Email : G20indonesia@depkeu.go.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Pasal 44

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Dengan ini dinyatakan bahwa tulisan yang dimuat dalam buku ini tidak secara otomatis mewakili sikap dan pandangan resmi dari Kementerian Keuangan atau Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya pertanggungjawaban atas isi tulisan tersebut sepenuhnya berada di tangan Tim Penyusun yang bersangkutan.

SAMBUTAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Forum G20 yang beranggotakan dua puluh negara industri maju dan negara berkembang berpendapatan menengah (*emerging markets*) telah melakukan berbagai kebijakan dan tindakan terobosan yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Negara-negara anggota G20 sepakat untuk menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam membuat desain dan evaluasi kebijakan bagi perbaikan kondisi perekonomian dunia yang saling tergantung dan terkoneksi. Berbagai realitas ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan satu negara, khususnya negara besar, akan mempengaruhi perekonomian negara lainnya.

Tindakan antisipatif kolektif negara G20 dalam merespon krisis global merupakan langkah yang sangat tepat untuk menghindari krisis keuangan besar lainnya di masa mendatang. Berbagai kebijakan yang dilakukan berbagai negara termasuk stimulus makroekonomi dan intervensi sektor keuangan berhasil menghindari terjadinya kondisi yang terburuk dari krisis ekonomi.

Pada G20 *Summit* ketiga di Pittsburgh, Amerika Serikat, tahun 2009, para pemimpin G20 telah mengadopsi kebijakan pemulihan krisis dan meletakkan komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi global yang kuat dalam jangka panjang. Para pemimpin sepakat untuk menyusun dan melaksanakan *Framework for Strong, Sustainable, and Balance Growth (FSSBG)*. Landasan dari FSSBG tersebut adalah komitmen dan tindakan terkoordinasi (*coordinated actions*) yang mana setiap negara anggota G20 menetapkan tujuan dan kebijakan domestik yang mendukung arah pencapaian kerangka tersebut. Negara-negara G20 melakukan "*mutual assessment*" terhadap kemajuan dari komitmen yang telah diajukan oleh setiap negara anggota G20 tersebut melalui *Mutual Assessment Process (MAP)*.

MAP merupakan pendekatan baru untuk kolaborasi kebijakan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara anggota G20. Tujuan dari MAP adalah untuk memastikan bahwa kebijakan kolektif akan menguntungkan semua negara anggota G20, walaupun komitmen masing-masing negara dapat saja berubah dan bertambah sesuai dengan kondisi setiap negara. Untuk mendukung agar komitmen kolektif tersebut dapat berjalan dengan baik, negara anggota G20 telah mengisyaratkan untuk berpartisipasi penuh dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk analisis dan evaluasi.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Toronto tahun 2010, para pemimpin G20 sepakat bahwa negara-negara G20 dapat meningkatkan kinerja ekonomi untuk mencapai tujuan *strong, sustainable, and balanced growth* dengan bekerja sama melakukan reformasi struktural yang mencakup empat area utama, yaitu fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pembangunan. Untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan berimbang, masing-masing anggota G20 telah mengidentifikasi berbagai kebijakan yang akan ditempuh yang dipandang membantu pencapaian hasil yang lebih baik dalam pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, dengan kondisi perekonomian global saat ini yang cenderung semakin melemah, negara-negara G20 perlu merumuskan kembali kebijakan dan regulasi yang diperlukan, termasuk melakukan reformasi struktural yang mendorong pertumbuhan dan memperkuat koordinasi diantara negara-negara G20 di semua area. Dalam konteks ini, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan G20 dalam mendukung agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi global. Pada tatanan domestik, Indonesia melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan implementasi fiskal jangka menengah dan melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan.

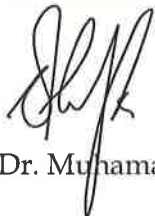
Di luar dari mekanisme MAP dan *enhanced accountability assessment*, penilaian komitmen juga dilakukan oleh pihak luar secara independen, termasuk oleh tim riset IORI dari Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto. Metode penilaian didasarkan atas berbagai laporan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, OECD, FSB, BCBS, maupun IEA. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menyambut baik partisipasi pihak independen untuk menilai kinerja setiap negara anggota G20. Terlepas dari keakuratan data dan informasi yang diperoleh oleh berbagai institusi tersebut, Indonesia memandang hasil penilaian tersebut dapat menjadi acuan perbaikan bagi pemenuhan komitmen masing-masing negara dan juga dukungan terhadap pemulihan perekonomian global.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, Indonesia perlu pula melakukan *self-evaluation* untuk pemenuhan komitmen-komitmen keikutsertaan Indonesia di forum G20. Untuk itu, kami menyambut baik dilakukannya penelitian dan *self-evaluation* oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Universitas Parahyangan sebagai acuan atau pembanding atas hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga riset internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada para *stakeholders* dan publik dengan bahasa yang sederhana mengenai pencapaian berikut tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi kesepakatan G20 dan komitmen yang telah disampaikan.

Kami menyampaikan ungkapan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Penyusun Buku atas terealisasinya penerbitan buku tentang G20 yang mengupas pencapaian Indonesia dalam pemenuhan komitmennya. Semoga buku ini dapat memenuhi minat dan kebutuhan pemangku kepentingan dan pemerhati kerja sama internasional, dan dapat digunakan sebagai salah

satu sumber referensi dan informasi tentang perkembangan keikutsertaan dan peran Pemerintah Indonesia dalam forum G20 khususnya terkait dengan pencapaian komitmen Indonesia di forum utama dunia ini.

Jakarta, Oktober 2013
Menteri Keuangan Republik Indonesia



Dr. Muhamad Chatib Basri

SAMBUTAN

SHERPA INDONESIA UNTUK FORUM G20

Berbagai forum dan kerjasama internasional telah dibentuk, dan berperan penting dalam stabilisasi perekonomian dunia terutama ketika krisis keuangan global menerpa. Sebagai anggota forum dan kerjasama internasional tersebut, Indonesia aktif mendorong reformasi arsitektur perekonomian dunia dan dapat berkontribusi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan melalui wadah kerjasama forum G20.

G20 bertujuan memberikan bagi negara-negara anggota G20 dan juga bagi negara-negara lain (*the rest of the world*) dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan seimbang. Untuk mencapai sasaran tersebut, forum G20 merangkul negara-negara di dunia serta mengoptimalkan fungsi IMF, Bank Dunia, OECD, dan lembaga-lembaga global lainnya. Hal ini juga diharapkan memperbaiki tata pengaturan isu keuangan global dan pembangunan yang sangat kondusif bagi pemenuhan komitmen-komitmen dalam forum G20.

Indonesia sangat mendukung dilaksanakannya monitoring dan evaluasi implementasi komitmen negara anggota forum G20 mempercepat pencapaian tujuan, Indonesia berkepentingan untuk pencapaian komitmen tersebut, mengingat G20 menguasai hampir 85% PDB global. Ini berarti kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara anggota forum G20 akan menentukan kestabilan perekonomian global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang.

Forum G20 telah menghasilkan berbagai kesepakatan dan komitmen di berbagai sektor. Di sektor ekonomi dan keuangan (*finance track*), dan juga di sektor pembangunan

dan tata kelola institusi publik (*non-finance track*). Sepanjang keikutsertaannya dalam forum G20 sampai saat ini (keketuaan Rusia 2013), prioritas Indonesia adalah penguatan implementasi komitmen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi global (*implementation of policy commitment to support global economic recovery*) dengan dasar kebijakan pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Indonesia juga menegaskan posisinya agar forum G20 memperkuat komitmen mendukung pemulihan ekonomi global melalui implementasi kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (*framework for strong, sustainable, and balanced growth*). Hal ini dilakukan utamanya dengan dukungan ketersediaan pembiayaan investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (*the Availability of Affordable Long-Term Investment Financing for Growth and Development*). Indonesia juga mendukung dilaksanakannya *diagnostic analysis* dan meminta forum G20 membahas program pembiayaan investasi jangka panjang termasuk di sektor infrastruktur.

Kontribusi yang telah diberikan Indonesia dalam pemenuhan komitmennya terus berkembang seiring dengan kompleksitas permasalahan, yang menunjukkan semakin meningkatnya pertautan antara satu negara dengan negara lain. Akhir kata, teori, konsep, dan gagasan akan selalu berinteraksi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu buku ini diharapkan memberikan wawasan mengenai komitmen dan posisi Indonesia di forum G20, dan juga memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Jakarta, Oktober 2013

Sherpa Indonesia untuk Forum G20



Mahendra Siregar

KATA PENGANTAR

WAKIL MENTERI KEUANGAN II DAN DEPUTI KEUANGAN G20

Keanggotaan Indonesia dalam G20 telah membuka berbagai peluang baru untuk ikut menciptakan tata kelola dunia yang lebih baik dan ikut mempengaruhi proses perkembangan perekonomian dunia yang kuat, berkesinambungan, dan berimbang. Hal ini dilakukan dengan konsisten dan bertahap melalui berbagai kesepakatan dan komitmen yang telah disampaikan oleh Indonesia dalam upayanya untuk mengatasi krisis keuangan regional dan global termasuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kelompok kerja yang mendorong pertumbuhan ekonomi, agenda pembangunan bagi negara-negara berkembang, dan tata kelola institusi publik.

Sebagai anggota G20, Indonesia mempunyai kesempatan yang besar untuk berperan dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan perekonomian regional dan global. Dalam forum G20, Indonesia berjuang melaksanakan dua peran penting, yaitu peran sebagai negara berkembang berpendapatan menengah (*middle income country*) dan peran sebagai 'wakil dari negara-negara berkembang'. Disamping itu, Indonesia berupaya memainkan peran mediator (*bridging*) di antara negara-negara maju dan negara berkembang. Oleh karenanya, Forum G20 menjadi media untuk mendongkrak citra positif Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kontribusi besar bagi kesejahteraan bersama di level regional dan global. Peran ini sesuai dengan amanah dan tujuan pendirian bangsa sebagaimana tercermin pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai inisiatif dan kontribusi aktif Indonesia berkontribusi dalam tercapainya berbagai kesepakatan di berbagai fora dalam jalur G20. Indonesia menjadi ketua

bersama (*co-chairs*) dengan Perancis dalam merumuskan dan melaksanakan agenda Kelompok Kerja Anti Korupsi. Demikian pula pada KTT Seoul (2010), Indonesia memainkan peran penting dalam menyusun agenda pembangunan pada Kelompok Kerja Pembangunan G20. Skema kebijakan keuangan inklusif menjadi salah satu inisiatif penting Indonesia dalam KTT Meksiko (2012). Pada tahun 2013, Indonesia bersama Jerman juga menjadi *Co-chairs Study Group on Financing for Investment* yang berupaya mencari alternatif pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan *small medium enterprises* (SMEs).

Meskipun Indonesia telah berupaya memaksimalkan peran pentingnya dalam Forum G20, namun hasil penilaian informal terkait pemenuhan komitmen-komitmen prioritasnya di G20 yang dilakukan lembaga independen masih menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian bersama yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dengan Universitas Parahyangan Bandung ini diharapkan dapat membantu menjelaskan perkembangan Indonesia dalam memenuhi komitmennya di G20 yang meliputi beberapa aspek seperti konsolidasi fiskal, reformasi struktural, reformasi IFIs, regulasi keuangan, dan penghapusan *fossil fuel subsidy*, dan sekaligus juga memberikan rekomendasi dalam memperbaiki berbagai kekurangan yang ada agar Indonesia dapat memaksimalkan pemenuhan komitmennya di G20.

Para pemimpin G20 telah menyepakati sejumlah komitmen berikut reformasi regulasi yang diperlukan pada sektor keuangan, perbankan, dan reformasi agenda pembangunan. Dalam pembahasan di jalur keuangan (*finance track*), beberapa komitmen utama yang telah disampaikan oleh negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia diantaranya mengenai konsolidasi fiskal, reformasi regulasi keuangan global, reformasi struktural, dan dukungan atas ketersediaan sumber daya energi dan komoditas. Pada konsolidasi fiskal

misalnya, Indonesia berupaya untuk memenuhi komitmennya dalam perbaikan pengelolaan anggaran dan utang. Kebijakan yang telah diambil antara lain adalah pengelolaan defisit anggaran di bawah 3% dari GDP dan penurunan rasio utang atas GDP di bawah 25%. Disamping itu, Indonesia mempertegas kebijakan konsolidasi fiskal jangka menengah melalui reformasi struktural dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan partisipasi angka kerja.

Terhadap komitmen reformasi regulasi sektor keuangan, reformasi diharapkan dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif dari tularan krisis keuangan global yang mengakibatkan meningkatnya risiko bisnis dalam berbagai sektor. Risiko ini menuntut dikembangkannya standar keuangan global seperti Basel III yang bertujuan untuk mengurangi risiko krisis likuiditas, dan memperkuat daya tahan dari institusi keuangan dan perbankan dari dampak krisis melalui peningkatan kualitas aset dan permodalan. Pengembangan standar keuangan global perlu dilakukan secara bertahap, konsisten, dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara agar proses implementasinya tidak kontra-produktif dengan upaya untuk menjaga stabilisasi ekonomi nasional.

Pengukuran atas pemenuhan komitmen tersebut oleh setiap negara G20 berikut target waktu (*timeline*) yang telah disepakati oleh setiap anggota G20 perlu dilakukan oleh lembaga penelitian independen. Pengukuran dan penilaian tersebut telah dimulai di masa presidensi Rusia di tahun 2013, dan tampaknya akan dilanjutkan oleh presidensi Australia pada tahun 2014. Indonesia perlu mengevaluasi kemajuan pemenuhan komitmen G20 secara internal, dan menyiapkan sumber daya berikut program kerja untuk memenuhi komitmen dan kesepakatan yang telah diambil.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal yang bersama-sama dengan Universitas Parahyangan telah mampu menyelesaikan penyusunan buku yang berisikan penilaian atas perkembangan pencapaian komitmen Indonesia pada Forum G20 . Kami menilai konten buku ini cukup relevan dan diperlukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan agenda G20. Buku ini memberikan informasi yang berimbang dan komprehensif atas berbagai komitmen yang telah dilaksanakan oleh Indonesia beserta perkembangannya, dan juga sekaligus memberikan rekomendasi atas beberapa komitmen yang perlu diselesaikan sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam upaya bersama mengatasi krisis ekonomi global. Selamat membaca.

Jakarta, Oktober 2013
Wakil Menteri Keuangan II Republik Indonesia
dan Deputi Keuangan G20



Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro

PERNYATAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini disusun dari hasil kolaborasi penelitian antara Kementerian Keuangan dan Universitas Parahyangan Bandung yang melibatkan para peneliti dan staf dari kedua institusi yang mendalami secara langsung penanganan isu-isu G20 di bidang masing-masing. Buku ini mencoba memberikan gambaran lebih lengkap atas pencapaian komitmen Indonesia di G20 melalui pelaksanaan berbagai agenda ekonomi dan pembangunan nasional. Hasil yang disampaikan melalui buku ini menunjukkan kesungguhan dan partisipasi aktif Indonesia dalam berkontribusi positif bagi perbaikan tatanan perekonomian global dalam rangka meletakkan fondasi yang kuat bagi terwujudnya pertumbuhan jangka panjang yang kuat, berimbang dan berkesinambungan.

Untuk ini, kami selaku Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal mengucapkan terima kasih kepada para penyusun atas kontribusi dan kerja sama yang baik sehingga mampu menghasilkan satu buah karya yang dapat dibaca oleh seluruh pemangku kepentingan. Kami juga berterima kasih kepada Dr. Irfa Ampri, Dr. Syurkani Ishak Kasim, dan Dr. Yulius Purwadi Hermawan selaku Tim Penyunting yang telah bekerja keras dalam menyunting buku ini dan mengambil benang merahnya untuk disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh staf PKPPIM atas dukungan dan kerja sama yang baik di dalam penyelesaian buku ini.

Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa buku ini diterbitkan semata-mata untuk tujuan penyampaian informasi yang dipandang bermanfaat kepada seluruh para pemangku kepentingan mengenai pemenuhan komitmen Indonesia dan juga memberikan rekomendasi atas beberapa komitmen yang perlu diselesaikan sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam

upaya membangun ekonomi global menjadi lebih baik. Oleh karenanya masukan dan koreksi dalam rangka penyempurnaan isi buku ini selalu terbuka untuk disampaikan kepada kami.

Terima kasih, dan selamat membaca.

Jakarta, Oktober 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irfa Ampri', written in a cursive style.

Irfa Ampri

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Keuangan RI	v
Sambutan Sherpa Indonesia untuk Forum G20	ix
Kata Pengantar Kepala Badan Kebijakan Fiskal	xi
Pernyataan dan Ucapan Terimakasih	xv
Daftar isi	xvii
Ringkasan Eksekutif	xxiii
Pendahuluan	1
Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas G20 (Tinjauan Pustaka)	9
Konsolidasi Fiskal dan Komitmen Indonesia pada G20	39
Peranan Perekonomian Indonesia terhadap Ketidakseimbangan Global	53
Stimulasi Reformasi Struktural	69
Kontribusi Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional	93
Reformasi Regulasi Keuangan	107
Penghindaran Kebijakan Proteksionis	135
Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Fosil dan Peningkatan Efisiensi Energi	149
Pembangunan Infrastruktur	165
Pelaksanaan Program Keuangan Inklusif di Indonesia	191
Penyediaan <i>Official Development Assistance</i>	203
Kesimpulan dan Rekomendasi	225

Lampiran:

Apendiks I. Indikator-indikator Pemenuhan Komitmen Individual, IORI Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, Universitas Toronto	240
Apendik II. Indikator-indikator Pemenuhan Komitmen dalam Pembangunan, IORI Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, Universitas Toronto	242
Apendik III. Tujuan dan Prioritas G20 di bawah Kepemimpinan Rusia	245

Daftar Tabel

Tabel 1	Rekap Skorsing Penurunan Komitmen Indonesia	xxxiv
Tabel 2.1.	Metode Pengukuran Pemenuhan Komitmen Anggota G20	34
Tabel 3.1.	Program-program yang Didanai oleh DAK	46
Tabel 4.1.	Hasil Uji Akar Unit Philips-Perron	62
Tabel 4.2.	Hasil Uji Kointegrasi Johansen Model Investasi	62
Tabel 5.1.	Current Account/GDP dan Public Debt/GDP Negara-negara Anggota G20 Tahun 2012	77
Tabel 5.2.	<i>Ease of Doing Business</i> di negara-negara G20	87
Tabel 6.1.	Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional (per 31 Desember 2012)	97
Tabel 6.2.	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional 2012-2013	98
Tabel 6.3.	Penyertaan Modal Negara Lainnya 2012-2013	99
Tabel 6.4.	Jumlah Angsuran General Capital Increase Indonesia (Total 5 Tahun Angsuran)	101
Tabel 7.1.	Perkembangan Implementasi Basel II di Indonesia	110
Tabel 7.2.	Rekomendasi G20/FSB terhadap <i>Hedge Funds</i> di Indonesia	127
Tabel 9.1.	Proteksi Perdagangan di Negara-negara G20 tahun 2008 - 2012	143
Tabel 9.2.	Peringkat Negara-negara Anggota G20 dalam Menjaga Komitmennya Menurunkan Tindakan Proteksionisme periode Oktober 2008 - Oktober 2012	145
Tabel 11.5.	Proyek dalam Proses Transaksi	174
Tabel 11.6.	Proyek yang ditawarkan	175
Tabel 11.7.	Proyek Prioritas	176

Tabel 11.8.	Proyek Potensial	178
Tabel 11.9.	Penyertaan Modal Indonesia pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	182
Table 11.10.	Kontribusi Negara ASEAN - 6 dalam IAI Work Plan I	183
Tabel 13.1.	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan KSS Indonesia Periode tahun 2000-2010	213
Tabel 13.2.	Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Seluruh Kementerian dan Lembaga terkait 2013-2015	215
Tabel 13.3.	Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular di Masing- masing Kementerian 2013-2015	216
Tabel 14.1.	Rekap Skoring Pemenuhan Komitmen Indonesia	231

Daftar Grafik

Grafik 3.1.	Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan (%)	42
Grafik 3.2.	Perkembangan Surat Berharga Negara dan Utang Luar Negeri	48
Grafik 4.1.	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran AS2001 - 2011	54
Grafik 4.2.	Defisit Anggaran terhadap PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2004 - 2011	56
Grafik 4.3.	IRF Model Perdagangan	64
Grafik 4.4.	IRF Ekspansi Model Perdagangan	65
Grafik 4.5.	IRF Model Investasi	66
Grafik 5.1.	Global Imbalances 1996 -2008	70
Grafik 5.2.	Neraca Berjalan Indonesia (dalam juta US\$)	79
Grafik 5.3.	Investasi dalam Infrastruktur dan <i>Gross Fixed Investment</i> dalam Persentase terhadap GDP	80
Grafik 5.4.	Anggaran Infrastruktur, Nominal dalam triliun Rp (skala kiri) dan% terhadap Belanja Negara (skala kanan)	81
Grafik 5.5.	Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur (Trilyun Rupiah)	81
Grafik 5.6.	Anggaran Infrastruktur, Nominal dalam triliun Rp (skala kiri) dan % terhadap Belanja Negara (skala kanan)	82
Grafik 5.7.	Persentasi Alokasi Anggaran Pemerintah untuk Pendidikan	83
Grafik 5.8.	Anggaran Pemerintah Pusat untuk Pendidikan	83
Grafik 5.9.	Jumlah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan (Juta orang)	84
Grafik 5.10.	Total Pekerja, Pekerja Sektor Formal dan Pekerja Sektor Informal (dalam %)	85
Grafik 5.11.	Pengangguran Terbuka dan Pekerja Tidak Penuh (Juta orang)	86

Grafik 10.1.	Produk Domestik Bruto (dalam USD yang disesuaikan dengan PPP) Negara-negara G20 untuk setiap energi setara 1 Kg minyak (tahun 2010 dan 2011)	154
Grafik 10.2.	Tingkat Subsidi BBM Sembilan Negara G20 (% dari Total Biaya Produksi)	156
Grafik 11.1.	Perkembangan Anggaran Infrastruktur 2007-2013	167

Daftar Gambar

Gambar 7.1.	Roadmap Konvergensi IFRS	118
-------------	--------------------------	-----

Daftar Diagram

Diagram 10.1.	Sumber Energi di Indonesia, tahun 2012	153
---------------	--	-----